

## BAB III

### PENUTUP

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilaksanakan oleh aparat kepolisian sesuai dengan perintah langsung dari Kapolri yaitu Operasi PETI Kapuas, meskipun belum optimal.
2. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan oleh kendala, yaitu jarak tempuh menuju lokasi yang jauh dan melewati hutan ataupun rawa, serta adanya perlawanan dari masyarakat pelaku PETI .

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membangun akses jalan yang memadai menuju desa-desa yang menjadi lokasi PETI di Kabupaten Kapuas Hulu, agar pengawasan dapat dilakukan lebih efisien.

2. Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan pendataan, pembinaan dan penyuluhan kepada para pelaku PETI, agar pelaku PETI dapat mengurus izin pertambangan baik secara perorangan ataupun koperasi.
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku PETI.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, 2019, *Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu 2019*.
- Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Simbo, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cetakan keempat (Revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.

### **Jurnal hukum:**

Lidya Afsary, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Dikawasan Taman Nasional Lore Lindu", Jurnal UNTAD, Universitas Tadulako.

### **Internet:**

Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia. <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/>, diakses 5 Maret 2019.

Aseanty Pahlevi, Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/02/kisruh-tambang-emas-rakyat-tak-berujung-di-kalimantan-barat/>, diakses 22 November 2019.

Aseanty Pahlevi, Pertambangan Emas Identik Merkuri, Begini Kondisinya di Kalimantan Barat. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/23/pertambangan-emas-identik-merkuri-begini-kondisinya-di-kalimantan-barat/>, diakses 27 Februari 2019.

Iskandar Zulkarnain, Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada 8 November 2019.

Sahat Oloan Saragih, Sungai Kapuas Tercemar Merkuri. <https://www.beritasatu.com/satu/491390-sungai-kapuas-tercemar-merkuri.html>, diakses 2 Maret 2019.

Yuliati Iswandiari, Berbagai Risiko Bahaya Merkuri untuk Kesehatan Anda. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-merkuri-kesehatan/>, diakses 12 Maret 2019.

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?>, diakses 5 Maret 2019.

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses 12 Maret 2019.

<https://www.seputarpengertian.co.id/2014/12/pengertian-dan-metode-penalaran-menurut-para-ahli.html>, diakses 6 September 2019.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/izin.html>, diakses 20 November 2019.

<https://suduthukum.com/2017/03/fungsi-dan-tujuan-perizinan.html>, diakses 20 November 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan K.S. Tubun No. 108 ☎ (0567) 22790 Fax (0567) 22790

**PUTUSSIBAU 78711**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 800/ 630 /DLH/SET.C

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : Ambrosius Sadau SH, M. Si
- b. NIP : 19730102 199803 1 008
- c. Jabatan : Kepala Dinas
- d. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat  
Dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Precisella Esita
- b. Nomor Mahasiswa : 160512331
- c. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup
- d. Lokasi Riset : Kab. Kapuas Hulu
- e. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap  
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)  
Yang Menggunakan Merkuri Sebagai  
Upaya Penanggulangan Pencemaran  
Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas  
Hulu.

Telah melakukan Riset/ Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup,  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas Hulu

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Putussibau, 16 Oktober 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kab. Kapuas Hulu,



**Ambrosius Sadau, SH, M. Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730102 199803 1 008

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Haposan Butar Butar
2. Pangkat/Nrp : BRIPKA/82060830
3. Jabatan : Kanit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu
4. Unit kerja : Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama : Precisella Esista
2. Nomor Mahasiswa : 160512331
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Kapuas Hulu
5. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)  
YANG MENGGUNAKAN MERKURI SEBAGAI  
UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN  
SUNGAI KAPUAS DI KABUPATEN KAPUAS  
HULU

Telah melakukan Riset/Penelitian di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Putussibau, 17 Oktober 2019

Kanit Tiga Reskrim Polres Kapuas Hulu



Haposan Butar Butar